

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah wujud upaya konkret guna merealisasikan kemakmuran kehidupan bagi warga. Dalam kerangka kemajuan itu tersedia kegiatan yang dijalankan secara lestari oleh warga guna memperoleh sasaran kemakmuran yang dicita-citakan, baik dalam rentang waktu pendek (jangka pendek) maupun durasi lama (jangka jauh).

Pembangunan perekonomian merupakan rangkaian yang berdimensi jamak, bukan semata memusat pada peningkatan ekonomi secara terbatas, tetapi juga meliputi peningkatan kesejahteraan serta kualitas keberadaan warga. Wilayah Banten, sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menempati lokasi yang penting dalam konteks pembangunan ekonomi di tingkat nasional. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) selaku tolok ukur ekonomi makro sentral, mencerminkan kemampuan suatu kawasan dalam menciptakan surplus ekonomi melalui aneka aktivitas ekonomi yang terjadi di teritori itu.

Kemajuan perekonomian merujuk pada peningkatan jumlah barang serta jasa yang diciptakan dalam jangka waktu tertentu. Buah dari barang dan layanan itu tampak dari nilai penghasilan negara suatu kaum. Karakteristik perkembangan ekonomi mencakup peningkatan output barang dan jasa, pertumbuhan produksi per kapita, serta transformasi dalam komposisi ekonomi. Pembentukan ekonomi merupakan suatu proses multidimensi yang tidak hanya menekankan pada penambahan aktivitas ekonomi, tetapi juga pada peningkatan taraf hidup penduduk Provinsi Banten, yang berdekatan secara geografis dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mempunyai peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi di skala nasional. Produk Domestik Regional Bruto menurut Harga Konstan (PDRB HK) adalah salah satu tolok ukur ekonomi makro yang menggambarkan kapasitas suatu daerah dalam menghasilkan produk dari berbagai kegiatan perekonomian (Serang, 2024).

Menurut data dari Lembaga Pusat Statistik, tolok ukur yang lazim dipakai guna menilai kemajuan perekonomian suatu wilayah ialah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dimaknai sebagai total surplus ekonomi dari komoditas serta jasa yang diwujudkan di suatu kawasan tertentu selama rentang masa tertentu,

tanpa memperhatikan siapa pemilik sumber daya produksi. Perkembangan perekonomian di sebuah wilayah diukur berdasarkan kenaikan PDB menurut nilai konstan suatu tahun dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan peningkatan produksi barang dan layanan di kawasan itu. Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dikerjakan dengan memakai nilai tidak berubah (Harga Tetap) atau nilai mengalir (Harga Berjalan). Kemajuan ekonomi dinilai dari selisih PDRB atas dasar harga tidak berubah (Harga Tetap). Perhitungan PDRB bisa dilakukan lewat tiga pendekatan: cara produksi, cara penghasilan, dan cara belanja. PDRB merupakan akumulasi surplus ekonomi dari seluruh komoditas serta jasa yang dihasilkan oleh semua aktivitas ekonomi di suatu kawasan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDB (Produk Domestik Bruto) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pada suatu periode waktu tertentu, dari suatu wilayah. Pada PDB, suatu wilayah yang dimaksud adalah wilayah negara (nasional), sementara pada PDRB, wilayah yang dimaksud adalah provinsi, kabupaten, atau kota (Madinah, 2024).

Provinsi Banten mengalami ketimpangan pembangunan yang signifikan antara wilayah utara dan selatan. Salah satu unsur pokok yang memicu disparitas tersebut ialah ketimpangan pada susunan perekonomian. Sementara Banten Selatan masih berfokus pada pertanian konvensional, Banten Utara didominasi oleh sektor industri yang maju pesat. Menurut Wahyudi bahwa “Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per wilayah menunjukkan perbedaan ini. Pada tahun 2022, Kota Tangerang memiliki PDRB tertinggi mencapai seratus delapan puluh dua koma dua satu triliun, sedangkan Wilayah Pandeglang hanya mencatat Produk Domestik Regional Bruto senilai tiga puluh dua koma nol tiga triliun. Perbedaan yang sangat mencolok ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan distribusi kekayaan di Banten tidak teratur (Wahyudi, 2024).

Jika dilihat dari sisi wilayah pembangunannya, produktifitas ekonomi Banten Utara mengungguli wilayah Banten Selatan, terutama pada wilayah Banten Utara yang secara geografis terdampak oleh limpahan pusat perekonomian di Indonesia yakni Provinsi DKI Jakarta. Adapun Kota Serang, sebagai Ibu kota di provinsi Banten tidak mampu menopang produktifitas wilayahnya yang mana sebagai status pusat di

provinsi Banten. Wilayah dengan kategori produktifitas yang relatif tinggi di dominasi oleh sektor industri (modern) yakni sektor yang mampu tumbuh lebih cepat, sebagaimana dominasinya bidang manufaktur, ranah bangunan, lapangan properti, ranah logistik dan penyimpanan, lingkup teknologi serta jaringan. Di sisi lain, kawasan yang memiliki daya hasil ekonomi cukup lemah diduduki utama oleh lapangan konvensional contohnya budidaya, pengelolaan hutan, serta usaha perairan, yang perkembangannya umumnya pelan (syarifudin & Dkk, 2024).

Satu dari sekian tolak ukur keberhasilan pembangunan di sebuah wilayah yang bisa dijadikan acuan ialah peningkatan ekonomi. Perkembangan finansial wilayah bisa dinilai menurut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin besar nilai PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula potensi pendapatan daerah tersebut. Peningkatan angka PDRB diprediksi mampu menurunkan kadar kesusahan di kawasan itu.

Berikut disajikan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Banten untuk periode 2021–2024.

Tabel 1.1
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Dan Provinsi Banten
ADHK (Juta Rupiah), Tahun 2021-2024

Wilayah kab/kota	PDRB ADHK Tahun 2021	PDRB ADHK Tahun 2022	PDRB ADHK Tahun 2023	PDRB ADHK Tahun 2024
Kab Pandeglang	20.116.898,02	20.815.208,14	21.341.090,31	21.928.594,66
Kab Lebak	21.278.484,95	22.087.738,08	22.706.798,37	23.377.240,36
Kab Tangerang	97.869.379,61	103.221.020,69	108.570.429,08	113.998.210,70
Kab Serang	54.844.646,90	57.607.109,12	60.370.564,40	63.255.334,10
Kota Tangerang	106.413.710,65	112.780.033,83	119.060.332,19	125.060.319,31
Kota Cilegon	77.163.935,90	80.647.729,97	84.537.543,85	88.628.114,51
Kota Serang	23.392.750,37	24.495.316,78	25.655.605,62	26.863.076,79
Kota Tangerang Selatan	62.393.119,54	66.021.910,49	69.562.289,19	73.052.841,63

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2024*

Tabel 1.1 informasi PDRB per jiwa wilayah kabupaten/kota serta Provinsi Banten dalam ADHK (juta rupiah) periode 2021 sampai 2024 menunjukkan pola peningkatan yang menggembirakan di seluruh daerah. Kabupaten Lebak menunjukkan kemajuan yang mencolok, naik dari 21.278,48 pada tahun 2021 menjadi 23.377,24 di tahun 2024. Kota Tangerang juga mengalami peningkatan yang berkelanjutan, mencapai

106.413.710,65 pada tahun 2021 naik menjadi 125.060.319,31 pada tahun 2024. Sedangkan wilayah seperti Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon memiliki laju pertumbuhan yang relatif lebih ringan. Secara menyeluruh, Provinsi Banten mencerminkan adanya peningkatan ekonomi per kapita selama rentang waktu itu.

Satu dari sekian rintangan pembangunan yang dijumpai oleh nyaris seluruh negara ialah persoalan kemiskinan, baik dalam sifat relatif maupun absolut. Gejala kekurangan tersebut paling umum terlihat di wilayah-wilayah yang tengah tumbuh, akibat ketidakseimbangan situasi pembangunan yang mereka lalui. Secara umum, isu kemiskinan bisa dikaji dari dua perspektif, yaitu: pertama, kemelaratan mutlak, di mana pendekatan tersebut mengidentifikasi jumlah manusia yang hidup di bawah garis batas kemiskinan tertentu, yang diukur menurut standar keberlangsungan paling dasar suatu bangsa, dan tolok ukur keberlangsungan dasar itu bisa berbeda-beda antarwilayah. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu bagian dari penghasilan nasional yang diterima oleh tiap-tiap kelompok penerima upah. Kondisi ini merupakan dampak akibat besarnya kesenjangan keuangan yang muncul di antara warga. Perbedaan tingkat pendapatan senantiasa tampak dalam tiap aktivitas perekonomian. Secara kodrati, senantiasa

ada orang dengan keadaan keuangan berlimpah dan orang dengan keterbatasan finansial. Ada pihak yang lahir dari asal-usul keluarga dengan kapasitas mencukupi, sehingga memperoleh peluang lebih luas terhadap akses pengembangan profesi serta peningkatan taraf kehidupan, sedangkan pihak lain mengalami ganjalan dalam mencapai kesempatan serupa. Kemelaratan merupakan suatu kondisi kekurangan yang dialami oleh seseorang dan berdampak langsung pada taraf keberadaannya. Permasalahan kesusahan secara berkelanjutan muncul entah di wilayah berkembang pesat ataupun kawasan yang tengah berkembang serta telah menjadi tantangan yang saling terkait, sehingga penanganannya membutuhkan langkah yang terencana dan lestari. Menurut informasi Bank Dunia (2015) bahwa “Dalam daftar wilayah dengan proporsi warga miskin paling tinggi di dunia, angka kemelaratan di Nusantara mencapai 15% dan berada di urutan kesembilan setelah India. Bukan hanya menjadi tantangan nasional, kondisi ini juga menyebar ke seluruh kawasan Nusantara, salah satunya di Wilayah Banten (Pradipta & Dewi, 2020).

Permasalahan kemiskinan di Wilayah Banten sangat berkaitan dengan besarnya tingkat tanpa pekerjaan serta ketimpangan antara jumlah tenaga produktif dan kesempatan kerja yang ada. Besarnya

angka tanpa pekerjaan ini mencerminkan kegagalan dalam upaya pembangunan ekonomi yang berakibat negatif terhadap kesejahteraan warga dan memicu peningkatan kesusahan. Di samping itu, kesusahan dipengaruhi oleh minimnya jenjang pendidikan serta keterbatasan akses terhadap pelayanan medis, sehingga individu yang hidup dalam kekurangan kerap kali memiliki kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Lebih lanjut, lonjakan laju kenaikan harga, terutama setelah biaya energi fosil meningkat, semakin memperlemah kemampuan belanja kelompok yang hidup dalam kekurangan.

Ketimpangan antar wilayah juga menjadi masalah, dengan peningkatan kemiskinan yang lebih besar di kota dibanding di desa. Masalah ini diperburuk oleh faktor struktural seperti kurangnya investasi dan perkembangan industri di daerah selatan Banten, termasuk Pandeglang dan Lebak, serta terbatasnya sumber daya alam. Menurut Rohmaniah bahwa “Secara statistik walaupun terdapat keterkaitan di antara ketidakberdayaan bekerja serta kesusahan, dampaknya tidak signifikan, menunjukkan bahwa kemiskinan di Banten dipengaruhi oleh banyak faktor lain selain dari pengangguran” (Rohmaniah Inayatur, 2024).

Kemiskinan terjadi karena adanya ketidakadilan ekonomi di masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi pasti menghasilkan perbedaan pendapatan. Selalu terdapat orang kaya dan orang miskin. Beberapa individu lahir dari keluarga dengan kondisi finansial yang melimpah, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan karier dan meraih kehidupan yang lebih sejahtera, sementara ada pula yang tidak memperoleh kesempatan serupa (A. Jajang W. Mahri et al., 2023)

Kemiskinan secara signifikan diduga memiliki dampak terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Fenomena ini terjadi karena kondisi kekurangan ekonomi dapat menghambat akses pendidikan individu serta memengaruhi kualitas layanan kesehatan, sehingga berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia. Sisi paling mendasar dalam langkah memajukan kualitas hidup warga adalah penurunan kadar kesusahan di sebuah kawasan. Unsur ini melampaui sektor finansial belaka, melainkan juga perlu dipertimbangkan dari perspektif sosial. Menurut Saputro bahwa “Satu dari sekian fokus utama dalam peningkatan kualitas hidup warga ialah optimalisasi terhadap taraf keberadaan masyarakat; dalam konteks ini, apabila proporsi kesusahan di suatu wilayah bertambah tiap periode

tahunan, maka kondisi itu berdampak pada percepatan perkembangan Angka Kemajuan Kehidupan Manusia” (Saputro, 2022).

Tabel 1.2
Persentase Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten Tahun 2021-2024

Wilayah kab/kota	Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2021	Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2022	Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2023	Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2024
Kab Pandeglang	10,72	9,32	9,27	9,18
Kab Lebak	10,29	8,91	8,68	8,44
Kab Tangerang	7,12	6,92	6,93	6,55
Kab Serang	5,49	4,96	4,85	4,51
Kota Tangerang	5,93	5,77	5,89	5,43
Kota Cilegon	4,24	3,64	3,98	3,75
Kota Serang	6,79	5,94	6,20	5,65
Kota Tangerang Selatan	2,57	2,50	2,57	2,36

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2024*

Berdasarkan Tabel 1.2 yang mencakup Persentase Garis Kemiskinan Wilayah Administratif Banten periode 2021 hingga 2024, terlihat bahwa angka kemiskinan secara keseluruhan mengalami

penurunan. Kabupaten Pandeglang menunjukkan persentase terbesar pada tahun 2021 (10,72%) dan terkecil pada tahun 2024 (9,18%). Sementara itu, Kota Tangerang tetap berada pada angka terendah, berkurang sejak angka 2,57 persen di masa 2021 menuju nilai 2,36 persen di periode 2024. Secara umum, data ini menunjukkan adanya kemajuan dalam mengatasi kemiskinan di seluruh Provinsi Banten selama periode tersebut.

Selain itu, dalam pandangan Islam, kemiskinan merupakan masalah yang amat krusial serta butuh telaah yang menyeluruh. Oleh karena itu, Islam memberikan penjelasan yang jelas mengenai masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial ini, baik dari sisi pemahaman maupun solusi yang dapat diterapkan.

Sebagai salah satu daerah pendukung ibu kota yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi, Banten mengalami sebuah paradoks kemiskinan yang unik selama periode 2021-2024. Persentase kemiskinan pada tahun 2021 hingga 2024 terjadi penurunan sejumlah 0,82 persen. Walaupun jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan berkurang, angka intensitas kesusahan di Banten bertambah sejak 0,790 persen pada masa September 2022 menuju 1,204 persen di periode Maret 2023. penurunan angka kemiskinan di banten, BPS: tingkat

keparahan masyarakat miskin meningkat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengurangan jumlah orang miskin, mereka yang tetap miskin mengalami kondisi kemiskinan yang lebih parah. Faktor pemicu kemiskinan di perkotaan begitu pula di wilayah pedesaan secara umum nyaris setara, seperti contohnya barang pokok padi olahan serta tembakau gulung berpenyaring (Rasyid Ridho, 2023).

Selain mengetahui keadaan kemiskinan, penelitian tentang IPM Banten memberikan pandangan yang lebih lengkap kesehatan, pendidikan, dan tingkat kehidupan yang memadai. IPM diciptakan oleh Program Pembangunan PBB dan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) memanfaatkan indikator ini untuk menilai taraf keberadaan warga.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menilai kadar keberhasilan peningkatan kualitas hidup warga menurut sejumlah aspek utama taraf keberadaan. Sebagai acuan standar taraf keberadaan, Angka Kemajuan Kehidupan Manusia disusun lewat kerangka yang meliputi Usia Harapan dalam wujud Perkiraan Masa Sehat (HHS), Akses terhadap Ilmu Pengetahuan yang diwujudkan dalam Harapan Lama Bersekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Bersekolah (RLS), serta

Tingkat Kesejahteraan Minimum yang diukur melalui Pengeluaran Nyata per Orang.

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten dari tahun 2021-2024 menunjukkan sejumlah masalah penting yang menunjukkan kesulitan pembangunan di provinsi yang berbatasan langsung dengan Jakarta ini. Meskipun secara keseluruhan, IPM Banten meningkat 1,76 poin dari 72,72 pada tahun 2021 menjadi 74,48 pada tahun 2024, namun data lebih rinci menunjukkan disparitas pembangunan yang signifikan antara daerah.

Indeks Pembangunan Manusia menjadi masalah serius di Provinsi Banten dimana terjadi ketimpangan yang sangat jelas, dimana daerah Kota Tangerang Selatan mencapai nilai 82,89 pada tahun 2024 sedangkan daerah Lebak hanya mencapai 66,99 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Data ini juga menunjukkan fenomena "*proximity effec*", di mana wilayah yang dekat dengan Jakarta, seperti Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon, menunjukkan kinerja IPM yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah yang lebih jauh, seperti Lebak, dan Pandeglang. Ini menunjukkan bahwa efek penyebaran

pembangunan Jakarta hanya menguntungkan wilayah yang berbatasan langsung atau memiliki konektivitas yang baik dengan ibu kota.

Tabel 1.3

Persentase IPM Banten Tahun 2021-2024

Wilayah kab/kota	IPM Banten 2021	IPM Banten 2022	IPM Banten 2023	IPM Banten 2024
Kab Pandeglang	65,17	65,84	66,42	66,99
Kab Lebak	64,03	64,71	65,21	65,86
Kab Tangerang	72,29	72,97	73,43	74,09
Kab Serang	66,82	67,75	68,39	69,03
Kota Tangerang	78,50	78,90	79,46	80,02
Kota Cilegon	73,35	73,95	74,54	75,14
Kota Serang	72,44	72,98	73,48	73,99
Kota Tangerang Selatan	81,60	81,95	82,28	82,89

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2024*

Menurut data yang tertera dalam Tabel 1.3 mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Banten selama rentang waktu 2021 sampai 2024, dapat dilihat adanya tren peningkatan yang

berlangsung di semua Kabupaten dan Kota. Kabupaten Pandeglang, yang memiliki nilai IPM paling rendah, menunjukkan kenaikan sejak angka 65,17 di masa 2021 menuju nilai 66,99 di periode 2024. Di sisi lain, Kota Tangerang Selatan, yang memimpin dengan IPM tertinggi, naik dari 81,60 pada tahun 2021 ke 82,89 pada tahun 2024. Wilayah lainnya, termasuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang, juga mencatat kemajuan kecil namun tetap signifikan. Pada umumnya, data ini menunjukkan adanya perkembangan dalam pembangunan manusia di seluruh Provinsi Banten selama periode tersebut, walaupun ketimpangan antarwilayah masih terlihat jelas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu daerah ditinjau dari aspek kualitas penduduknya. IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia yang didasarkan pada beberapa unsur pokok kesejahteraan hidup, yaitu kesehatan, pendidikan, serta tingkat kehidupan yang memadai. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, IPM berfungsi sebagai acuan dapat diterapkan untuk menilai kemajuan hasil upaya peningkatan taraf keberadaan penduduk pada suatu wilayah. Sebagai instrumen pengukuran, IPM dinilai cukup representatif dalam merepresentasikan hasil pembangunan manusia,

jika dibandingkan dengan indeks gabungan lainnya. Dinyatakan cukup memadai, mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi tiga aspek utama yang secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup individu, yaitu harapan hidup yang panjang dan sehat, tingkat pendidikan, serta taraf hidup yang layak. Apabila ketiga aspek ini menunjukkan perkembangan yang bermakna, dengan demikian, taraf kapasitas insani dipastikan selaras dengan peningkatan angka tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas makam penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan PDRB ADHK Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten Tahun 2021-2024”**

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat kesenjangan IPM antar kabupaten/kota di Provinsi Banten, dimana wilayah perkotaan memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten.
2. Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh PDRB ADHK belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata di Provinsi Banten.

3. Adanya disparitas dalam akses layanan pendidikan, Di mana rata-rata durasi pendidikan dan angka ekspektasi sekolah di kawasan perkotaan umumnya lebih besar dibandingkan kawasan pedesaan.
4. Perlunya kajian mendalam mengenai pengaruh antara pertumbuhan PDRB ADHK, kemiskinan dengan peningkatan IPM untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif di Provinsi Banten.
5. Terdapat disparitas signifikan dalam tren kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan di Banten, dengan perkotaan menghadapi tantangan lebih besar.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan pembahasan mengenai PDRB ADHK, kemiskinan dalam perspektif islam dan IPM, serta adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada analisis hubungan antara PDRB ADHK dan kemiskinan dengan komponen IPM di Provinsi Banten pada tahun 2021-2024. Data yang digunakan terbatas pada tahun 2021-2024 (data tahunan), dengan dukungan data sekunder dari BPS Banten dan sumber resmi lainnya. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan

penelitian dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan mendalam pada aspek-aspek yang telah ditentukan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh antara pertumbuhan PDRB ADHK terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten tahun 2021-2024?
2. Bagaimana pengaruh antara kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten tahun 2021-2024?
3. Bagaimana pengaruh PDRB ADHK dan kemiskinan secara simultan terhadap IPM di Banten tahun 2021-2024?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh antar PDRB ADHK terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Banten tahun 2021-2024
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Banten tahun 2021-2024

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh PDRB ADHK dan kemiskinan secara simultan terhadap IPM di Banten tahun 2021-2024

F. Manfaat/signifikasi penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah wawasan dan pemahaman mengenai hubungan antara PDRB ADHK dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten pada periode 2021–2024, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kemampuan analitis, keterampilan menulis ilmiah, serta memperluas perspektif peneliti dalam bidang ekonomi pembangunan.
- b. Bagi masyarakat Provinsi Banten, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan terkait pengaruh PDRB ADHK serta kemiskinan terhadap

peningkatan IPM. Dengan adanya informasi ini, masyarakat diharapkan lebih memahami kondisi sosial-ekonomi daerahnya, sehingga dapat mendukung partisipasi aktif dalam pembangunan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehari-hari maupun dalam perencanaan program pembangunan daerah.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk para pelajar Fakultas Ilmu Ekonomi dan Usaha Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya pada Jurusan Ekonomi Syari'ah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi tambahan sekaligus referensi yang bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut. Di samping itu, temuan kajian ini mampu menyajikan ilustrasi tentang penerapan konsep-konsep perekonomian pembangunan dalam kerangka wilayah spesifik.
- b. Bagi lingkungan cendekiawan, kajian ini diprediksi sanggup menyumbang dalam wujud pelengkap wawasan serta rujukan akademik tentang hubungan di antara PDRB ADHK, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Temuan

riset tersebut mampu dijadikan salah satu rujukan dalam perluasan telaah akademik, memperkaya literatur akademik, serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait pembangunan daerah, ekonomi makro, maupun kesejahteraan masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dikaji, penulis mengemukakan struktur penyusunan skripsi ini secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang mencakup uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta penyajian sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi telaah literatur hasil kajian kepustakaan. Berbagai teori yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut akan menjadi landasan teoritis dalam memahami isu yang diteliti, disertai dengan penelitian sebelumnya, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, yang menguraikan secara menyeluruh hal-hal seperti saat dan tempat studi, keseluruhan subjek beserta contoh yang diambil, faktor-faktor yang diteliti, bentuk serta

pendekatan investigasi, cara pengumpulan informasi, dan teknik penafsiran data yang diterapkan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang menyajikan deskripsi umum objek penelitian, pengujian hipotesis, serta interpretasi dan analisis data yang telah dilakukan.

Bab V Kesimpulan dan Saran, yang memaparkan temuan akhir dari penelitian berupa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan studi lebih lanjut.